

TANTANGAN GMIH DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI DAN DAN PEMBANGUNAN DI MALUKU UTARA PASCA KONFLIK

Junsal Efendy Duan

Prodi Filsafat Keilahian, Universitas Hein Namotemo, Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara
Villa Vak I, Tobelo – Halmahera Utara 97762
Telpon/Fax. +629242621669
E-mail: vendyerz@gmail.com

ABSTRAK

Gereja Masehi Injili di Halmahera atau GMIH sebagai sebuah organisasi menghadapi kenyataan yang paradoks. Sebagai sebuah prnata ilahi, sekaligus merefleksikan pranata sosial. Oleh karena itu, di satu sisi GMIH dituntut mewujudkan ajaran-ajaran Yesus Kristus bagi umatnya, di sisi lain GMIH harus berperan aktif untuk masyarakat di Maluku Utara. Dalam keberadaannya tersebut GMIH pun menghadapi tantangan yang cukup besar. Perubahan sosial, ekonomi dan politik sepanjang sejarah dan menguatnya kapitalisme yang bermuara pada konflik horizontal menuntun GMIH pada keinginan sebuah perubahan yang lebih baik. Perubahan tersebut melalui penataan organisasi, iman dan ajaran dan sejumlah perbaikan dibidang lainnya adalah wujud dari tujuan tersebut.

Kata Kunci: *Globalisasi, paradoks*

ABSTRACT

The Evangelical Christian Church in Halmahera or GMIH as an organization faces a paradoxical reality. As a divine prerogative, it also reflects the social order. Therefore, on the one hand GMIH is required to realize the teachings of Jesus Christ for its people, on the other hand GMIH must play an active role for the people in North Maluku. In the presence of the GMIH also faces considerable challenges. The social, economic and political changes throughout history and the strengthening of capitalism leading to horizontal conflict led GMIH to the goal of a better change. Such changes through organizational structuring, faith and doctrine and a number of other improvements in the field are the realization of that goal.

Keywords : *Globalization, paradox*

Keywords : *Globalization, paradox*

1. PENDAHULUAN

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan sebuah organisasi keagamaan Kristen Protestan terbesar di Maluku Utara yang terbentuk sebagai konsensus antara masyarakat di Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya pada 6 Juni 1949 di Tobelo. Konsensus tersebut terjadi atas karya Tuhan melalui pengabaran injil para zending *Utrechtsche Zending Vereeniging* – UZV. (Magany, 1984:415-449).

Wujud formal GMIH adalah sebuah badan hukum (*recht persoon*) maka BPHS saat itu mengusulkan status GMIH kepada pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta yang kemudian menyatakan bahwa: “Gereja Masehi Injili di Halmahera, melanjutkan pekerjaan *Utrechtsche Zending Vereeniging* di Halmahera” (Magany 1984:331).

GMIH akhirnya mengatur organisasinya secara mandiri. Perkebunan milik *Zending* kemudian dikelola untuk operasionalisasi pelayanan meliputi bidang

kehatan, pendidikan dasar 9 tahun, pertanian, perkebunan, perdagangan, pembinaan jemaat, serta membangun Akademi Teologia di Ternate (Magany, 1984:464). Upaya-upaya GMIH tersebut bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam perkembangan kemudian GMIH menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah keberadaannya. Pasca konflik horizontal GMIH wajib membangun kembali hubungan persaudaraan yang rukun dan damai dalam wilayah Maluku Utara. Sementara itu dalam konteks dunia yang semakin tanpa batas (globalisasi) kompetisi bisnis antara individu semakin terbuka luas dan makin menguatnya kapitalisme. Selain itu peluang untuk mengembangkan GMIH sebagai organisasi yang dapat menjawab kesejahteraan warganya harus dilakukan.

GMIH harus dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam menyiapkan warganya menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji bagaimana GMIH secara internal

menghadapi tantangan globalisasi dan bagaimana GMIH memberikan kontribusi bagi pembangunan di Maluku Utara.

2. GLOBALISASI: Fenomena *Global Paradox*

Runtuhnya Blok Timur berdampak pada perubahan dunia secara dramatis (Naisbitt,1994:5). Hubungan-hubungan antara individu, bangsa, negara dan berbagai organisasi kemasyarakatan semakin terbuka, dengan didukung perkembangan teknologi dan komunikasi serta semakin kuatnya pengaruh politik, ekonomi, dan nilai-nilai sosial-budaya.

Dalam karyanya megatrends 2000, Naisbitt dan Aburdene kemudian memprediksi pada abad 21 akan terjadi trend-trend yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia, sebab dapat menggoncangkan dalam beberapa aspek kehidupan (Naisbitt & Patricia Aburdene,1990:3). Ada sepuluh kecenderungan yang akan timbul antara lain: 1) ledakan ekonomi global tahun 1990-an. 2) renaissans dalam bidang seni. 3) munculnya pasar bebas sosialisme. 4) gaya hidup global dan nasionalisme kebudayaan. 5) privatisasi di negara-negara makmur. 6) meningkatkan wilayah pasifik. 7) tahun 1990-an adalah era wanita dalam kepemimpinan. 8) era biologi. 9), kebangkitan agama di milenium ketiga. 10), kemenangan individual (Naisbitt, 1990:3).

Pada karya berikutnya, *Global Paradox*, Naisbitt semakin mempertegas Globalisasi harus dilihat sebagai sebuah fenomena *global paradox* (Naisbitt,1994:5). Perubahan sosial, ekonomi dan politik maupun entitas lain harus dipahami dalam berbagai bentuknya tersebut (Naisbitt,1994:5). Era globalisasi menimbulkan tantangan namun sekaligus juga harus dilihat sebagai peluang.

Naisbitt juga menegaskan bahwa globalisasi memperlihatkan adanya "*trend-trend*" dunia secara luar biasa menuju kearah kebebasan politik dan pemerintahan-sendiri pada satu pihak, dan pembentukan aliansi ekonomi pada pihak lain" (Naisbitt, 1994:3).

Meskipun karya Naisbitt dan Aburdene diterbitkan tiga dekade silam namun masih relevan dengan realita di Indonesia. Berakhirnya pemerintahan orba dan memasuki masa reformasi adalah sinyal bahwa *trend-trend* yang dimaksud oleh Naisbitt menjadi kenyataan apabila menilik tuntutan reformasi. Legitimasi kekuasaan melalui demokrasi harus diakhiri. Kekuasaan pemerintah pusat harus dilimpahkan juga ke daerah dengan pemilu di tingkat lokal. Demikian halnya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah demi kemajuan pembangunan di daerah.

Salah satu trend dari fenomena *global paradox* yang dikaji juga oleh Naisbitt dan Aburdene adalah kebangkitan agama di milenium ketiga. Menurutnya kesadaran spiritual ini tidak terdapat pada agama-

agama utama dan terorganiasi, tetapi ada dalam sekte-sekte kecil dan fundamentalis. Kebangkitan sekte menjadi demikian meningkat baik dari segi jumlah pengikutnya maupun kualitas dan propagandanya (Naisbitt & Aburdene, 1990:3).

Berkembangnya fundamentalisme dan radikalisme ormas keagamaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca reformasi telah menjadi perhatian serius pemerintah hingga saat ini. Intoleransi melalui kekerasan bahkan dilakukan oleh warga GMIH terhadap denominasi lain maupun dengan sesama warga GMIH sering terjadi.

2.1 Paradoks GMIH dalam Realita Sosial di Maluku Utara

Ketika Para *Zending* UZV mengunjungi Pulau Halmahera untuk mengabarkan Injil terhadap warga lokal mayoritas yang masih memeluk kepercayaan leluhur dan tidak kepada warga lokal yang telah menganut agama Islam karena ada perjanjian dengan Sultan Ternate.

Konversi dari kepercayaan leluhur ke agama Kristen dimulai sejak awal abad ke-19 di Galela oleh van Dijken. Ia memberi penekanan pada metode pemahaman iman melalui katekisasi secara sungguh-sungguh. Sementara itu di Tobelo pekabaran injil dilakukan oleh Heuting melalui baptisan masal karena metode yang dipergunakan oleh Heuting dengan membaptis kepala-kepala suku dan keluarga terkait.

Sebagai suku mayoritas di Halmahera, suku Tobelo terkenal dalam hubungan kekerabatan yang erat dan mengikat. Sehingga ketika kabar sanak-saudara yang telah memeluk agama Kristen kemudian diikuti oleh yang lain.

Pasang surut hubungan dengan Ternate sering terjadi dan dipicu oleh meningkatnya perdagangan di kawasan tersebut semenjak semenjak masa Portugis bersekutu bersama kesultanan Ternate menyerang wilayah-wilayah di Utara pulau Halmahera. Bahkan ketika *canga* (Angkatan Laut) Tobelo menguasai hampir sebagian wilayah Timur Nusantara rivalitas ini selalu disertai dengan peperangan.

Revolusi industri di Eropa yang menghasilkan perkembangan teknologi kapal uap berdampak pada orang Tobelo. Hegemoni laut orang Tobelo akhirnya berangsur-angsur melemah. Mereka kemudian perlahan-lahan mengalami penyingkiran secara ekonomi (*economic marginalization*) dan tercabut dari budayanya (*cultural disinheritance*). (Topatimasang, 2004:49-51).

Menurut Topatimasang penyingkiran secara ekonomi bukan hanya terjadi pada suku Tobelo saja, tapi pada suku Sahu, Modole, Sawai dan Bacan.(Topatimasang, 2004:17-114) dengan berbagai bentuknya.

2.1.1 Dalam Bingkai Orde Lama & Orde Baru

Saat perang dunia kedua melanda Pasifik dan berdampak di Hindia Belanda. Para Zending ditahan dan pelayanan dilakukan oleh guru-guru yang berasal dari Halmahera dan sekitarnya, Minahasa, Sangihe, dan Ambon.

Seorang warga Jailolo bernama S.B. Tolo berinisiatif untuk membentuk Gereja Protestan Halmahera (GPH), yang kemudian melalui persidangan menyebut GPH sebagai nama lahir, sedangkan GMIH adalah nama baptis (Serani).

Dengan refleksi pengalaman historis maupun realita yang dialami, Warga GMIH kemudian menyadari bahwa karya Tuhan nyata bagi umat-Nya., kata "di" pada nama Gereja Masehi Injili di Halmahera menunjukkan bahwa gereja yang dibangun tidak berdasar pada satu suku saja namun terbuka pada siapa saja (oikumenis).

Oleh karena gereja itu berada dalam dunia maka ia harus tunduk pada aturan penguasa di dunia, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Paradoks GMIH ini yang akan menentukan arah GMIH kedepan. Di satu sisi GMIH harus mengikuti iman dan ajarannya, disisi lain ia harus mengikuti ketetapan-ketetapan pemerintah yang dapat saja merugikannya. Inilah yang terjadi pada masa Orde Baru.

Tiga dekade awal setelah GMIH hadir di Maluku Utara merupakan masa terbaik pelayanan GMIH. Namun suksesi kekuasaan dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru (Orba) beserta kebijakannya dalam menerima investasi asing, tidak diimbangi dengan regulasi yang baik di segala sektor sehingga menciptakan kesenjangan sosial.

Kerjasama dengan gereja mitra luar negeri mendapat pengawasan ketat dan dibatasi. Isu-isu agama diciptakan (Kristenisasi/Islamisasi) kemudian menimbulkan prasangka-prasangka buruk dalam masyarakat. Masyarakat pun menjadi tidak kritis melihat realita sumber daya alam Maluku Utara dieksploitasi demi kepentingan pemodal asing dan oknum-oknum pemerintah (Topatimasang, 2004:62-63). Monopoli bisnis antara penguasa dengan pemodal membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Para *broker* (baca: Mafia) mengatur harga komoditas hasil perkebunan dengan sewenang-wenang.

Upaya menguatkan dominasi pemodal dan penguasa terhadap sumber daya alam Maluku Utara diciptakan melalui "demokrasi semu" dengan menempatkan unsur-unsur lapisan masyarakat sebagai wakil rakyat. Pemerintah Orba memahami bahwa umat mematuhi pemuka agama. Warga gereja tentunya lebih mendengar pendeta dibanding pemimpin daerah.

Model demokrasi semu yang diciptakan tersebut semula bagian dari perang ideologi antara Amerika Serikat (AS) dengan rival Uni Soviet. Bagi AS, Indonesia merupakan negara *Proxy* dalam membendung pengaruh komunisme di kawasan Asia.

Namun, ketika Uni Soviet runtuh tahun 1991, AS semakin menjadi negara adidaya terutama melalui kepemilikan modal lembaga-lembaga bantuan moneter yang dikendalikan AS. Selubung perang ideologi sejatinya adalah bisnis, pemilik modal berkuasa sepenuhnya dan mengatur pemerintah Indonesia.

Pemerintah Orba yang penuh korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pun runtuh. Jerat hutang kaum kapitalis membawa Indonesia ke pusaran krisis moneter tahun 1997 dan berujung suksesi kekuasaan 1998. Kesenjangan sosial yang terjadi selama 32 tahun kemudian menjadi pemicu konflik melalui isu-isu sektarian dan berdampak hingga pelosok daerah, termasuk Maluku Utara pada tahun 1999 dan melemahkan pondasi kehidupan bersama.

2.1.2 Dalam Bingkai Orde Reformasi

Konflik horizontal merupakan tantangan terbesar bagi GMIH. Sebagai Gereja yang mengajarkan cinta kasih sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan harus menghadapi paradoks bahwa konflik tersebut tidak dihindarkan karena naluri manusia. Alih-alih menyembuhkan beban traumatis dan menyusun dan merefleksikan kembali iman dan ajaran gereja yang sesuai dengan pergumulan warganya, elit-elit GMIH lebih fokus pada pertikaian untuk menyambut demokratisasi di aras lokal.

Sejak Sidang Sinode (SS) Wari 2002 persoalan politik dengan gereja, dalam hal ini pelayan Tuhan (pendeta) yang ikut berpolitik menjadi diskursus yang hangat. Demikian juga dengan Sidang Sinode 2007 dan 2012 dan kemudian berakhir pada terbentuknya dua kepengurusan sinode. Kepengurusan SS Dorume yang mendukung Pendeta yang berpolitik dan kepengurusan SSI (Sidang Sinode Istimewa) 2013 yang mendukung pembaharuan GMIH dan menolak Pendeta berpolitik.

Kepengurusan BPHS Pembaharuan saat ini telah mendorong warganya untuk berinvestasi melalui koperasi kredit agar mampu membiayai warganya dalam bidang usaha kecil dan menengah. Selain itu juga warga didorong untuk berinvestasi terhadap masa depan pendidikan anak agar tingkat pendidikan anak semakin baik.

Selain itu juga pendidikan dan pelatihan yang konsekwen untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional dalam bidang entrepreneur terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi di kawan Maluku Utara yang berada di bibir pasifik sebagai kawasan perkembangan ekonomi di Asia Pasifik seperti yang direncanakan oleh pemerintah saat ini.

Dari kasus GMIH tersebut, tercipta apa yang disebut Gerit Singgih hidup dalam ketegangan paradoksal. Dan bayang-bayang fundamentalisme dan liberalisme (Eka Darma Putra, 6-7)

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas kita telah melihat bahwa GMIH sebagai sebuah organisasi keagamaan (pranata ilahi) harus hidup dalam ketegangan paradoks dengan sebagai organisasi sosial (pranata sosial). Dalam ketegangan inilah GMIH harus menyikapinya melalui upaya yang nyata dilakukan agar dapat menghadapi tantangan perubahan global yang sekarang telah berporos di Asia-Pasifik sebagaimana yang diprediksi oleh Naisbitt.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma Putra, Eka. Agama-Agama dan Tantangan Kebudayaan, Jakarta: Balitbang PGI dan Yayasan Bina Darma, 1994.
- Magany, M. Th. Bahtera Injil di Halmahera (BPHS GMIH, 1984
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdane., *Megatrends 2000* (terj.). Jakarta: Binarupa Aksara, 1990.
- Naisbitt, John., *Global Paradox* (terj.) Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Topatimasang, Roem (peny.). Orang-Orang Kalah, (Yogyakarta: Insist Pres, 2004).